

DOSAKAH BERPOLITIK?

Mencerahkan Pemahaman “Politik” Dan Membongkar Kedok “Zona Nyaman” Umat Gereja Dalam Keterlibatan Berpolitik

Oleh: **Anjelinus Sandri**

Mahasiswa Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero



gbr.Illustrasi. (Foto: NU Online)

Prolog

Kerap kali kita mendengar endusan liar tentang satu kata yang selalu diidentikan dengan arti yang buram. Politik merupakan topik yang hangat dan akan selalu aktual untuk diperbincangkan. Tidak hanya makanan runyam bagi kaum berdasi juga sampai pada rakyat jelata meski hanya berijazah sambut baru¹. Rupa-rupanya politik begitu akrab dengan kehidupan bermasyarakat. Tetapi politik kerap kali diidentikan dengan kejahatan, penindasan, korupsi, penipuan, nepotisme, dan ketidakadilan. bandingkan kita sering mendengar ocehan orang tua Ketika kita mencoba menipu mengambil barang sesuatu, kata yang pertama keluar dari mulut mereka yakni “politik benar prilakumu”. Deretan persoalan ini merupakan contoh pemahaman masyarakat yang keliru tentang politik. Kita tidak serta merta menyalahkan pemahaman masyarakat, akar muncul pemahaman yang keliru dari masyarakat diakibatkan oleh praktik politik yang tidak lagi berjuang demi kebaikan Bersama (*bonum commune*). Stigma yang kian akut akan term politik yang kini makin ekstrem dilabel sebagai dosa. Sederhananya “politik itu berdosa” citra buruk aktivitas politik kian mencekik rakyat kecil dengan segudang janji manis yang pada akhir tak kunjung wujud. sekelumit persepsi hitam dari politik menjadi logis bagi masyarakat untuk mengasingkan diri dari euforianya. Bagi umat gereja khususnya konteks gereja keuskupan Ruteng menjauhkan diri dari partisipasi berpolitik dan berteduh nyaman dalam serangkaian kesibukan rohani menjadi ancaman kian nyata. Hal ini ditegaskan dengan lantang oleh Paus Fransiskus bahwa olah kerohanian yang rumit tetapi minus tanggung jawab sosial politik itu sebagai bentuk konsumerisme rohani yang lahir dari

¹ Izasah sambut baru merupakan sebutan atau istilah untuk seseorang yang mengenyam bangku Pendidikan sebatas penerimaan sakramen tubuh dan darah kristus dalam kehidupan mengereja

individualisme sempit dan dapat mengancam hidup beriman yang sejati. Lantas apa sebenarnya arti dari politik dan bagaimana menjadi warga negara dan warga gereja yang berpartisipasi?

Apa Itu Politik?

Mark Twain berujar, “setiap orang tahu politik, tetapi tidak semua orang memahaminya”.² Ungkapan ini mau menunjukkan bahwa term politik memiliki cakupan makna yang sangat luas dan cukup sulit menemukan pemahaman yang secara benar dalam masyarakat mungkin kebenarannya telah dilukai oleh sejumlah ketimpangan dan dosa para politisi kita sebut saja korupsi, penipuan/pengelapan, nepotisme dan ketidakadilan, dan politik selalu diidentikan demikian. Menengok keragaman pemahaman seputar politik maka penulis terlebih dahulu mengurai secara singkat apa itu politik.

Salah satu kata (entry point) untuk memahami hubungan Gereja dengan kegiatan politik adalah dengan cara menemukan arti dan makna yang lengkap mengenai terminologi kata ‘politik’. Kata politik secara historis memiliki hubungan dengan kata Yunani *polis* yang berarti benteng atau kota. Kata ini memiliki hubungan dengan kata Yunani lainnya yakni *Politheia*, yang menunjukkan makna beberapa hal seperti halnya penduduk atau warga negara, hak-hak warga negara, kewarganegaraan, tata negara, atau bentuk pemerintahan³. Dalam bentuk yang lebih sederhana, politik dapat dipahami sebagai seni memerintah/mengelola untuk mencapai tujuan tertentu, dalam hal ini tujuan untuk kesejahteraan suatu negara dengan cara melibatkan diri secara aktif dalam mengusahakan kesejahteraan itu. Inilah yang disebut sebagai sebuah politik dalam praktek atau sebagai “politik praktis” ‘Normalkah warga gereja terlibat aktif dalam politik praktis’ berhadapan dengan kesimpangsiuran pandangan masyarakat dalam konteks warga gereja bahwa politik itu tabu, atau karena kualitas sumber daya manusia masyarakat kita yang lemah tentang pengetahuan berpolitik. Kekeliruan pandangan ini tidak hanya bercokol pada tataran pandangan melainkan telah muncul pada praktis nyata.

² Carlton Cylmer Rode, *Pengantar Ilmu Politik*, (Jakarta: Rajawali Press, 1993), hlm.1.

³ Poltak Y.P. *Sibarani Bolehkah Gereja Berpolitik*, (Jakarta: Ramos Gospel Publishing House, 2004), hlm.54

GEREJA DAN POLITIK DI INDONESIA: SEBUAH DILEMA



Gereja (baca; Umat) Minus Tanggung Jawab

Dalam perjalanan sejarah, silih berganti terjadi dominasi gereja atas negara. Karena itu, para apologet dan para teolog Kristen, sejak gereja mula-mula sampai sekarang ini berusaha untuk mencari hubungan yang relevan antara gereja dan negara, dan kegiatan berpolitik sebagai tanggung jawab warga gereja selaku warga negara. Belakangan kebanyakan dari mereka berpendapat bahwa gereja harus dipisahkan dari negara. Negara tidak boleh mencampuri urusan gereja, sebaliknya gereja patut memberikan sumbangsih sebagai perwujudan dari “menjadi garam dan terang dunia⁴”. Sejarah perpolitikan bangsa Indonesia tidak bisa lepas dari kiprah tokoh-tokoh gereja khususnya gereja katolik dalam upaya mewujudkan kemerdekaan dan kemajuan, sebut saja ada Mgr. Soegijapranata yang mendukung kuat upaya perlawanan terhadap penjajah, ada I.J Kasimo yang berhasil mendudukkan golongan katolik menjadi bagian integral bangsa ini serta berani mempertahankan Pancasila sebagai predikat NKRI⁵, Frans Seda juga tokoh katolik yang berkiprah sejak pemerintahan Soekarno dan menangani sejumlah persoalan mulai dari Pertanian hingga keuangan negara. Hari ini juga sejumlah besar tokoh katolik yang berperan andil dalam kemajuan bangsa ini. Lantas sebagai umat gereja (Katolik) kita berpuas diri dengan usaha dan prestasi mereka? Dan mungkin sudah berangapan bahwa gereja sudah memberi banyak untuk negara sehingga saatnya untuk keluar dan menikmati ruang zona nyaman dari berbagai isu dan pergumulan politik yang hanya mengusik ketenangan. Dan argumentasi pemisahan yang jelas antara institusi agama dan negara yang akhir-akhir ini dipertukik Dengan pandangan berpolitik itu tabu, kotor, korupsi, penipu telah

⁴ Daulat Tambuna, *Bolehkah Gereja Berpolitik*. “Bolehkah Gereja Berpolitik?” – Character Building (binus.ac.id), diakses tanggal, 16 Maret 2023

⁵ Arnoldus Maku. *Joseph Kasimo: Dari Gereja Untuk tanah Air*. Dalam Biduk Seminari tinggi Ritapiret Ed.II.XLXV.Januari-Juni 2015.hlm,41

mempertebal alasan bagi gereja (umat) untuk menarik diri dan menghindar dari keterlibatan aktif dalam kegiatan berpolitik. Dan pandang ini telah diinabobokan oleh alasan umat lebih nyaman dengan sibuk urusan rohani di Gereja atau kelompok doa tertentu. Johan Baptist Metz dengan keras mengomentari hal ini yakni agama boleh jadi memberi hiburan spiritual dan rasa nyaman bagi masyarakat modern, namun kenyamanan dan masturbasi spiritual ini membutakan pemeluk agama terhadap persoalan sosial Politik dalam masyarakat. Alhasil, agama lunak terhadap struktur-struktur sosial dan kebijakan politik yang tidak adil⁶. Bahwasanya menarik diri dari urusan berpolitik jelas bukanlah tindakan terpuji, bukanlah juga Tindakan untuk menyederhanakan keadaan karena dianggap sibuk jika terlibat aktif seperti menyempatkan diri mendengar kampanye, sosialisai dari pemerintah dan para politisi yang mau mendedikasikan diri untuk negara, serta memandangnya sebagai kegiatan yang hanya membuang waktu. Lebih jauh kita melihat akibatnya bahwa problemnya ialah dimensi sosial iman dipasung dalam rasa aman diri yang ilusif. Disinilah Allah diprivatisasi pada sangkar kenyamanan dan kepuasan privat. Yang hanya merupakan bentuk lain dari pemakluman Nietzsche di penghujung abad ke-19 dulu *God Is Dead*, Allah mati di dalam agamamu.

Agrumentasi Metz dipertegas secara terang-terangan oleh Paus Fransiskus dalam *Evangelli Gaudium* menurut Paus kita perlu waspada terhadap jenis kehidupan rohani yang menyibukan diri dengan berbagai kesibukan olah kerohanian yang rumit tetapi minus tanggung jawab sosial politik itu sebagai bentuk konsumerisme rohani yang lahir dari individualisme sempit dan dapat mengancam hidup beriman yang sejati⁷. Pemimpin gereja Katolik sejagat ini melihat salah satu *trend* gaya hidup beragama dari umat gereja yang menjadikan alasan untuk tidak terlibat aktif dalam urusan sosial politik. Gereja (baca institusi) memiliki tanggung jawab besar dalam berpolitik yakni mengantar, membimbing umatnya untuk menjadi penerang bagi kegiatan berpolitik, di tengah situasi politik yang marak dengan ketamakan, korupsi mengedutkan rekening pribadi. Gereja dalam konteks umat mesti menjadi garam dan terang dunia itu sendiri. Keterasingan diri/ Bahasa gaulnya “cuek” dan zona nyaman gereja (umat) dalam berpartisipasi dalam berpolitik tidak hanya pada tataran pandangan tetapi telah membuah pada Tindakan praktis, diantaranya;

Gereja (Umat) & ‘Golput’

⁶ Peter Tan, *Agama Minus Nalar*. (maumere: Ledalero,2020), hlm.197

⁷ Fransiskus, *Evangelli Gaudium*, sukacita injil(EG), Penerj. FX. Adisusanto, SJ dan Bernadeta Harini Tri Prasasti, (Jakarta: Dokpen KWI, 2014), hlm.78

Golput adalah bentuk paling praktis dari pada Tindakan gereja (umat) juga sebagai warga negara dalam menghindari keterlibatan berpolitik. Golput merupakan akronim dari ‘golongan putih’. Golput atau golongan putih merupakan suatu Gerakan moral yang tidak bersifat melembaga, bahkan sering bersifat rahasia yang mengadakan praktik dan kegiatan pada saat pemilu dengan prinsip tidak mau memilih salah satu pemimpin atau salah satu partai politik yang ada. Golput selalu hadir dalam setiap negara manapun didunia ini yang mengadakan pemilu. Tentu saja jumlahnya beragam. Latar belakan munculnya Gerakan ini juga beragam , beberapa diantaranya adalah pertama karena dianggap tidak ada pemimpin atau partai politik yang memiliki kapabilitas yang cukup untuk memimpin bangsa atau menjadi perwakilan suara rakyat. Kedua, karena menganggap bahwa pemilu adalah rekayasa sekelompok orang atau kelompok penguasa. Ketiga, karena terkena provokasi dari pihak lain yang tidak menghendaki pemilu terjadi, dan terakhir karena lemahnya pengetahuan berpolitik dari warga negara. Praktek golput terjadi dalam beberapa bentuk yakni di antaranya warga negara memenuhi syarat untuk menjadi pemilih namun tidak datang untuk memilih pada hari pemilihan. Kedua warga negara yang memenuhi syarat pemilihan namun tidak terdaftar sebagai pemilih, ketiga warga negara yang terdaftar sebagai pemilih dan berada di tempat pemilihan, namun ia merusak gambar atau tidak teguh menentukan hak pilih. Apakah golpout menjadi tindakan yang keliru? Sebagai warga gereja apakah membenarkan Tindakan golput sebagai bentuk kepasifan dalam keterlibatan berpolitik?⁸

Sikap Eksklusif Dan Apatis

Tajamnya ketimpangan dan dosa para politisi dalam merealisasi kebijakan yang pro-rakyat kecil kian menjadi alasan bagi rakyat (umat gereja) untuk menarik dan menutup diri dari aktivitas berpolitik. Sering bahkan selalu kita dengar ocehan dari masyarakat “buat apa sibuk urus politik, jika berujung mereka (para politisi) yang duduk empuk di atas kursi pemerintah dan menikmati kekayaan negara sedangkan kita tetap seperti ini, tidak mendapatkan apa-apa” pandangan demikian keluar mulut dari masyarakat sebagai tanggapan atas ketimpangan dan dosa politik negeri ini. Dan berujung pada sikap eksklusif dan apatis terhadap segala bentuk kegiatan politik. Dengan mudah kita temukan dalam masyarakat Sikap dan paradigma

⁸ Ibid.hlm. 265.

masyarakat (umat gereja) yang demikian tidak bisa terus kita benarkan, sebab keberlangsungan dan masa depan negara dalam hal ini berpolitik tidak akan mencapai titik kesejahteraan sebagaimana yang dicita-citakan oleh para fundator bangsa ini yang tertuang jelas dalam UUD 1945 yakni kesejahteraan bagi segenap bangsa Indonesia bukan kesejahteraan bagi golongan tertentu.

Mengapa Gereja Harus Terlibat Dalam Berpolitik

Konsili Vatikan II dalam *Gaudium Et spes* no 31 menyerukan, kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan manusia dewasa ini terutama yang miskin dan terlantar adalah kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan murid-murid Kristus. Gereja hendaknya memberi kesaksian iman dan merasuk segenap hidup orang beriman termasuk dimensi politik. Politik seperti apa yang hendak gereja andilkan. Oscar culman membedakan antara *Politeia* dan *Politeuma*. *Politeia* berarti politik dalam arti merebut kekuasaan atau kedudukan jabatan dalam pemerintah, sedangkan *Politeuma* adalah politik yang menekankan tegaknya nilai kerajaan Allah didunia misalnya keadilan, kebenaran, kejujuran dan keberpihakan terhadap rakyat dan mewujudkan peradaban baru yang mengangkat martabat manusia sebagai mahluk citra Allah.

Antara *Politeia* dan *Politeuma*, apakah gereja memilih salah satu dan menjauhkan yang lainnya. Kedua-duanya gereja(baca: umat) mesti ambil andil semua. Dalam konteks *politeia* atau politik mencapai kekuasaan merupakan sebuah panggilan bagi gereja untuk bisa melahirkan kebijakan-kebijakan yang mensejahterakan masyarakat, mengedepankan kejujuran dan berani melawan kesewenangan dari pihak-pihak yang mengganggu kebaikan Bersama. Dalam konteks *politeuma*, gereja mendapat panggilan menjadi warga gereja dan negara yang mendukung serta mengkritisi kebijakan yang merugikan masyarakat, menjadi warga negara yang mampu membawa visi bangsa ke arah cita-cita Bersama.

Dan apakah politik itu suatu hal yang berdosa? Sehingga umat semakin mesra dan nyaman dengan segudang kesibukan kerohanian yang rumit namun minus tanggung jawab sosial politis sehingga dilabeli bentuk “konsumerisme” rohani yang lahir dari individualisme yang sempit. Dan pada akhirnya bercokol kebijakan yang menimpang, korupsi, penipuan, dan kemiskinan yang lahir dari kebijakan politik untung diri akan menjadi tontonan yang fantastik bagi umat/rakyat.

Berpolitik; Sebuah Panggilan Luhur Gereja

Semua manusia lahir dalam konteks bernegara dan bermasyarakat. Bumi dan isinya sudah dibagi dalam banyak negara, sehingga semua orang hidup di atasnya berkonteks politik. Setiap umat Katolik baik klerus maupun awam adalah bagian warga masyarakat suatu negara maka otomatis bagian dari masyarakat politis untuk terlibat berpolitik. Dokumen *Lumen Gentium* dan *Gaudium Et Spes* memuat keterlibatan gereja didalam masyarakat tanpa melupakan dirinya sebagai komunitas yang menjadi tanda dan sarana keselamatan bagi dunia. Gereja particular yang dipimpin uskupnya secara jelas tidak berpolitik praktis. Umat gereja awam yang memang masyarakat harus terjun aktif dalam berpolitik praktis dengan terang hati nurani. Dengan berpolitik praktis kaum awam menyuarakan visi moral politis hidup bermasyarakat yakni membela martabat manusia dan merealisasikan kesejahteraan umum(*bonum commune*) berdasarkan iman yang benar. Keterlibatan politik dapat dibagi dua (2): Keterlibatan politik kepedulian sosial dan politik praktis. Berpolitik kepedulian sosial merupakan panggilan orang beriman baik klerikus maupun awam. Panggilan ini merupakan penerapan Ajaran Sosial Gereja agar efektivitas sakramen (khususnya sakramen Krisma dan Ekaristi) berdaya dan dialami dalam kesatuan perayaan ritual dan tindakan real sebagai umat gereja dan warga masyarakat dalam satu negara. Visi moral politis yaitu menghormati martabat manusia dan kesejahteraan umum, diperjuangkan dalam misi yang terealisasi dalam perbuatan real. Berpolitik Praktis Politik praktis adalah struktur dan upaya untuk memperoleh kekuasaan politik, baik bagi diri sendiri sebagai perseorangan atau atas nama partai. Dalam hal ini seseorang terlibat mencari kedudukan dan melaksanakannya dalam satu lembaga negara, sebagai perseorangan atau pun atas nama kelompok/partai. Disebut juga kegiatan politik praktis kalau seseorang membantu orang lain atau partai tertentu untuk memperoleh kekuasaan sesuai dengan aturan main yang berlaku dalam sistem politik yang ada. Berpolitik praktis merupakan panggilan awam untuk terlibat dalam struktur dan kegiatan politis, dengan berpartisipasi aktif di trias politika dan bidang politis lain. Faktual bahwa sistem dan kegiatan politik praktis sering disindir muncul karena cara dan tindakan berpolitik yang diperkan sering tidak mengindahkan etika politik yang baik dan benar. Politik praktis biasanya secara taktis berusaha memperjuangkan kekuasaan.

EPILOG

Menyambut pesta demokrasi akbar setanah air yang berlangsung pada 14 februri 2024 adalah moment bagi rakyat Indonesia menentukan sendiri arah jalan kemajuan bangsa ini. Gereja pun harus membuka diri, terlibat dan memberi terang bagi masyarakat dalam konteks umatnya. Sebagaimana saya ulaskan sebelumnya peran andil gereja tidak hanya cukup pada

batas politik *politeuma* atau warga negara yang memberi hak pilih juga pada tataran politik *Politeia* yakni para pengambil keputusan. Negara membutuhkan jiwa-jiwa yang jernih dan mau melayani masyarakat dengan dedikasi tanpa *money*-kasih. Urgensi keterlibatan gereja (umat) dalam konteks berpolitik di tanah Manggarai jelas sangat-sangat urgen berhadapan dengan sejumlah masalah yang segera harus diselesaikan pada masa ini. Dilansir dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT menunjukkan ketiga kabupaten di Manggarai berada dalam angka kerentanan dan cukup memprihatinkan dalam segi kesejahteraan, dan pembangunan manusia. Karena itu gereja dan negara butuh pemimpin yang benar-benar ada dan melihat dari akar sampai pada pucuk persoalan umat Manggarai. Lebih dari itu dibutuhkan keterlibatan gereja baik institusinya lebih lagi umat untuk menghasilkan tokoh politik yang kredibel.

Di akhir tulisan ini perlu penulis tegaskan bahwa menggugah keterlibatan gereja dalam berpolitik itu tidak serta merta mengiyakan keterlibatan praktis dari institusi gereja seperti para imam dan uskup. Sebab kaum klerus dilarang untuk terlibat aktif dalam politik praktis tetapi harus terlibat dalam politik kepedulian sosial. Larangan ini jelas disebut dalam KHK, 1983, kan, 287,2. Yang berbunyi “para klerus jangan turut ambil bagian aktif dalam partai-partai politik dan dalam kepemimpinan serikat-serikat buruh kecuali jika menurut otoritas Gerejaawi berwenang dalam hal ini untuk melindungi hak-hak gereja dan memajukan kesejahteraan umum”⁹. Namun meskipun demikian para imam memiliki tanggung jawab inti dalam mengarahkan umatnya sebagaimana lokus pembahasan penulis yakni umat gereja yang terlibat aktif, mengarahkan, membimbing, dan menerangi umatnya untuk menjadi warga negara yang 100% Katolik 100% Indonesia. Tetapi juga tentu dengan ajaran yang murni dan riil mendukung sebab agama masuk dalam catatan sensitif potensi ketimpangan berpolitikan dalam hal ini mengubur sedalam-dalamnya politik identitas.

Daftar Pustaka

Buku Dan Majalah

Rode, Carlton Cylmer. (1993) *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta: Rajawali Press

Sibarani Y.P. Poltak. (2004) *Bolehkah Gereja Berpolitik*, Jakarta: Ramos Gospel Publishing House.

Maku, Arnoldus. *Joseph Kasimo: Dari Gereja Untuk tanah Air*. Dalam Biduk Seminari tinggi Ritapiret Ed.II.XLXV. Januari-Juni 2015.

⁹ Kitab Hukum Kanonik, (*Codex Luris Canonici*, 1983), Diterjemahkan Oleh Sekretariat KWI. (Jakarta: Obor, 1999). Kan, 207,1.

Tan Peter, (2020). *Agama Minus Nalar*. Maumere: Ledalero

Dokumen-dokumen

Fransiskus, *Evangelii Gaudium*, sukacita injil(EG), Penerj. FX. Adisusanto, SJ dan Bernadeta Harini Tri Prasasti, Jakarta: Dokpen KWI, 2014

Kitab Hukum Kanonik, (*Codex Luris Canonici*, 1983), Diterjemahkan Oleh Sekretariat KWI. (Jakarta: Obor,1999)